

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Sitti Murniati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar
sittimurniatI@ymail.com

ABSTRACT

Financial reports are generated from each SKPD which is then used as the basis for making financial reports for the Provincial/Regency/City Government. Local government financial reports are prepared to provide relevant information regarding the financial position and all transactions carried out by local governments during a reporting period, compare the realization of revenues and expenditures with the predetermined budget, assess financial condition, assess the effectiveness and efficiency of local governments and assist compliance with laws and regulations. The purpose of this study was to analyze the effect of the internal control system, accountability and transparency on the quality of financial reports. By taking samples using saturated samples as many as 76 respondents. The data is processed by Multiple Regression. The results of the study indicate that the variables of the internal control system, accountability and transparency have a significant effect on improving the quality of the financial reports of the Regional Finance Agency.

Keywords: *Internal Control System, Accountability, Transparency, Quality of Financial Reports.*

History of article	<i>Received: 17-10-2021</i>	<i>Reviewed: 01-11-2021</i>	<i>Revised: 24-11-2021</i>	<i>Accepted: 22-12-2021</i>	<i>Published: 30-12-2021</i>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal. Oleh sebab itu, dalam rangka memantapkan otonomi

daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai memikirkan investasi untuk pembangunan sistem akuntansi pemerintah daerah dan meningkatkan aktivitas pengendalian yang lebih baik (Purba & Amrul, 2017).

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan diperlukan guna memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membantu *top management* dalam proses pengambilan keputusan. Pada sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus

dilakukan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar-benar berkualitas (Mulyati et al. 2019).

Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas diperlukan suatu sistem pengendalian intern atas laporan keuangan untuk mencegah berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan serta pengendalian dan untuk menghasilkan informasi atas laporan keuangan yang andal. Sistem Pengendalian Intern (SPI) sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem pengendalian internal yang ada maka organisasi juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal (Triono & Dewi, 2020).

Sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam hal ini, yang paling pokok adalah pertanggungjawaban keuangan yaitu sebagai upaya nyata dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan daerah yang hasilnya dapat dirasakan seluruh

lapisan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sudah seharusnya menjadi tugas pihak-pihak terkait upaya melaksanakan dan memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pembuatan laporan keuangan daerah adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung akuntabilitas publik yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Adanya pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas publik dalam pengelolaannya sehingga dengan adanya akuntabilitas publik dan transparansi dapat menciptakan laporan keuangan berkualitas baik di pemerintah pusat maupun daerah (Nordiawan, 2014). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sriwijayanti (2018) bahwa transparansi pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan serta dapat dipercaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Idawati dan Eleonora (2019) menyatakan hasil bahwa akuntabilitas publik mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas publik dan transparansi telah menghasilkan informasi keuangan menjadi lebih meningkat artinya transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian intern, akuntabilitas, transparansi dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern bertujuan untuk menentukan hasil yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana. Pengendalian sebagai upaya kontrol birokrasi harus dilaksanakan dengan baik, apabila tidak dilaksanakan cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi atau birokrasi. Pelaksanaan suatu rencana dan

program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengendalian yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan (Ulum, 2014). Jadi sistem pengendalian intern penting untuk dilaksanakan, mengingat sistem pengendalian intern tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sujamto (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Seluruh kegiatan sistem pengendalian intern harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, analisis dan pengelolaan resiko. Adanya tujuan sistem pengendalian intern menurut defenisi tersebut adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2015).

Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Definisi akuntabilitas publik menurut Kusumastuti (2014) adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Halim (2016) menyatakan akuntabilitas publik sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk

meminta kewajiban pertanggungjawaban. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas publik yaitu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Ulum (2016) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan menurut Mursyidi (2015) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Transparansi

Transparansi dapat dikatakan dengan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Definisi Transparansi menurut Tanjung (2014) yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sabarno (2013) pengertian transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Mursyidi (2015) menyatakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Secara harafiah transparansi adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh atau keterbukaan. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna yang membutuhkan maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kualitas adalah suatu keadaan terbaik dalam batas-batas kondisi tertentu sesuai dengan keinginan. Definisi dari kualitas menurut Kasmir (2015) adalah seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri dan sifat yang memiliki pengaruh agar dapat mencapai kepuasan dari kebutuhan yang diharapkan.

Laporan Keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode pelaporan tertentu. Laporan keuangan menurut Kasmir (2015) adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Munawir (2015) mendefinisikan laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) laporan keuangan sektor publik adalah posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Kualitas laporan keuangan menurut Nordiawan (2014) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang yang berjumlah 76 orang pegawai dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus atau jenuh yaitu mengambil seluruh populasi sasaran untuk dijadikan sampel (Algifari, 2014). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik agar model regresi lebih *representative*. Untuk menjawab masalah penelitian digunakan teknik analisis regresi berganda yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

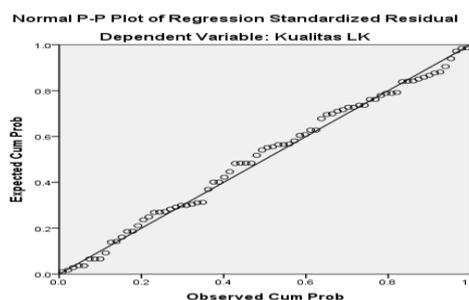
Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk menjamin data dari sampel penelitian telah berdistribusi secara normal, maka dilakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan analisa grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* terhadap masing-masing variabel yaitu sistem pengendalian intern, akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan.

Gambar 1. Uji Normalitas

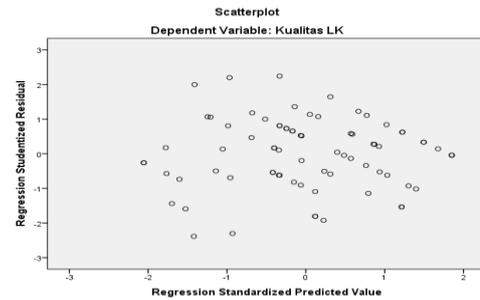


Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa seluruh data telah berdistribusi secara normal pada seluruh variabel. Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Asumsi *homoskedastisitas* atau penyebaran (*scedasticity*) sama (*homo*) yaitu varians yang sama. Kebalikan dari *homoskedastisitas* adalah *heteroskedastisitas* yang tidak lain merupakan pelanggaran asumsi klasik. Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa pada gambar tidak membentuk pola atau bentuk, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam varians kesalahan.

Gambar 2. Uji Heterokedastisitas



c. Uji Multikolinearitas

Pendeteksian multikolinearitas juga dapat dilakukan melalui nilai VIF. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 ($VIF > 10$), maka diperkirakan terjadi multikolinear, namun jika nilai VIF lebih kecil 10 ($VIF < 10$), maka diperkirakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.874	2.428		.772	.443		
SPI	.407	.140	.383	2.907	.005	.379	2.640
Akuntabilitas	.267	.126	.226	2.109	.038	.573	1.745
Transparansi	.253	.123	.229	2.064	.043	.535	1.868

a. Dependent Variable: Kualitas LK

Berdasarkan pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya permasalahan multikoleniaritas dalam model

regresi karena nilai VIF (*variance inflation factor*) tidak melebihi angka 10.

2. Uji Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan

keuangan Badan Keuangan Daerah. Hasil pengolahan data berupa persamaan regresi yang tertera pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Koefisien Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.874	2.428		.772	.443
SPI	.407	.140	.383	2.907	.005
Akuntabilitas	.267	.126	.226	2.109	.038
Transparansi	.253	.123	.229	2.064	.043

a. Dependent Variable: Kualitas LK

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui hasil analisis regresi berganda yang

diformulasikan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,874 + 0,407X_1 + 0,267X_2 + 0,253X_3$$

- Koefisien $b_0 = 1,874$ artinya apabila variabel sistem pengendalian intern (X_1), akuntabilitas (X_2) dan transparansi (X_3) tidak mengalami perubahan (konstan), maka kualitas laporan keuangan (Y) Badan Keuangan Daerah tidak berubah.
- Koefisien $b_1 = 0,407$ artinya setiap peningkatan variabel sistem pengendalian intern (X_1), maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 40,7%.
- Koefisien $b_2 = 0,267$ artinya setiap peningkatan variabel akuntabilitas (X_2), maka diharapkan dapat meningkatkan

kualitas laporan keuangan (Y) Badan Keuangan Daerah sebesar 26,7%.

- Koefisien $b_3 = 0,253$ artinya setiap peningkatan variabel transparansi (X_3), maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) Badan Keuangan Daerah sebesar 25,3%.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen X_i (sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y).

Tabel 3. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	159.913	3	53.304	26.746	.000 ^b
Residual	143.495	72	1.993		
Total	303.408	75			

a. Dependent Variable: Kualitas LK

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, SPI

Berdasarkan tabel 3 nilai F_{hitung} sebesar 26,746 > nilai F_{tabel} 2,76 dengan level signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern (X_1), akuntabilitas (X_2) dan transparansi (X_3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan (Y). Untuk melihat keeratan hubungan antar variable X (sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi) dengan Y (kualitas laporan keuangan) serta seberapa besar kontribusi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan dapat diketahui dalam tabel hasil uji determinasi dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.527	.507	1.41173

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, SPI

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,726 yang berarti bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel X (sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi) dengan variabel Y (kualitas laporan keuangan). Nilai positif menunjukkan hubungan searah dimana variabel sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi jika ditingkatkan, maka kualitas

laporan keuangan pun akan meningkat. Nilai $R^2 = 0,527$ memperlihatkan besarnya kontribusi ketiga variabel X (sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi) terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan) sebesar 52,7%. Masih terdapat variabel lainnya yang mampu meningkatkan variabel kualitas laporan keuangan yaitu sebesar 47,3%.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel sistem pengendalian intern (X_1), akuntabilitas (X_2) dan transparansi (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) Badan Keuangan Daerah. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H_1 : Terdapat pengaruh sistem pengendalian intern (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Badan Keuangan Daerah.
- H_2 : Terdapat pengaruh akuntabilitas (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Badan Keuangan Daerah.
- H_3 : Terdapat pengaruh transparansi (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) Badan Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel *Coefficients*, diketahui nilai t_{hitung} variabel sistem pengendalian intern sebesar $2,907 > t_{tabel}$ sebesar $1,670$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < probabilitas 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti variabel sistem pengendalian intern (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Nilai t_{hitung} variabel sistem pengendalian intern sebesar $2,907 > t_{tabel}$ sebesar $1,670$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < probabilitas 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti variabel sistem pengendalian intern (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Variabel pengelolaan keuangan daerah (X_3) juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) yang diketahui melalui t_{hitung} sebesar $2,117 > t_{tabel}$ $1,670$ dengan tingkat signifikansi variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X_3) sebesar $0,039 < probabilitas 0,05$.

Pembahasan

Hasil pengolahan data mengemukakan bahwa variabel sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Untuk itu, penjelasan pengaruh antar variabel akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah, hal ini

berarti bahwa sistem pengendalian intern memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan Badan keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan syarat terciptanya kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian intern sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu sangat perlu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern ini juga akan berdampak pada opini Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Agoes (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mulyati et al. (2019) yang menunjukkan bahwa antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Sementara itu hasil uji hipotesis menunjukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan sebesar 41,6% terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah, hal ini berarti bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan Badan

Kuangan Daerah. Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dengan diterapkannya akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan Badan keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan syarat terciptanya kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Semakin akuntabelnya pejabat dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah, maka kualitas laporan keuangan telah mengacu kepada aturan keuangan daerah yang telah menerapkan prinsip *value for money* dan sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektif dengan prinsip akuntabilitas, yang merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hasil penelitian sesuai dengan teori keagenan pada sektor publik yang dikemukakan oleh Halim (2016) bahwa, fungsi pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) dalam hal ini masyarakat. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Idawati & Eleonora (2019) yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Badan Keuangan Daerah, hal ini berarti bahwa transparansi memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dengan diterapkannya transparansi yang tinggi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi transparansi yang diterapkan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan Badan keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan syarat terciptanya kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Dengan adanya transparansi dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui transparansi juga tersedianya informasi yang memadai tentang penyusunan rencana kerja dan informasi laporan keuangan daerah diberikan tepat waktu dan handal kalau transparansi atau ketebukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Nordiawan (2014) bahwa, pengelolaan APBD yang mengarah pada transparansi akan meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Maka semakin baik transparansi, semakin baik pula pengelolaan APBD pada suatu daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Permendagri No. 21 tahun 2011. Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektif dengan prinsip transparan, yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulana dan Lubis (2020) yang menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan artinya transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan SKPD Kota Medan

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah, hal ini menerangkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Akuntabilitas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah, hal ini menerangkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah. Transparansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah, hal ini menerangkan bahwa semakin tinggi transparansi yang diterapkan, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti, Badan Keuangan Daerah agar lebih meningkatkan kualitas kinerja pemerintah melalui fungsi pemeriksaan intern yang baik agar kualitas pengelolaan keuangan tetap berjalan berdasarkan perencanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan daerah. Meningkatkan kualitas akuntabilitas, agar hasil kinerja pemerintah dapat dilihat nyata dalam segi pertanggungjawaban pemerintah yang berkualitas, dengan demikian akan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat serta Badan Keuangan Daerah agar lebih meningkatkan kinerja pemerintah melalui transparansi yang baik bagi penggunaan informasi atau masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah tetap handal dan akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2016). *Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Algifari. (2014). *Analisis Regresi, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Daerah Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2019). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan Dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal EQUITY: UPN Veteran Jakarta*, 22(2), 153-172.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. (Edisi ke-1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumastuti, L.P. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulana, Z. & Lubis, N.K. (2020). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 1-14.
- Mulyadi. (2015). *Pemeriksaan Dalam Pengawasan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyati, N.S., Faridah, E., & Prawinegara, B. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntapedia*, 1(1), 60-71.
- Munawir, S. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta. Liberty.
- Mursyidi. (2015). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nordian, D. (2014). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purba, R. Br., & Amrul, A.M. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Sabarno, H. (2013). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD. *Jurnal EKOBISTEK*, 7(1), 89-101.

- Sujamto. (2014). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, A.H. (2014). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua: Pendekatan Teknis Sesuai dengan PP No 71/2010*. Bandung: CV Alfabeta.
- Triono, S & Dewi, S.P. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 213-220.
- Ulum, I. M.D. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. (Edisi ke-3). Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.